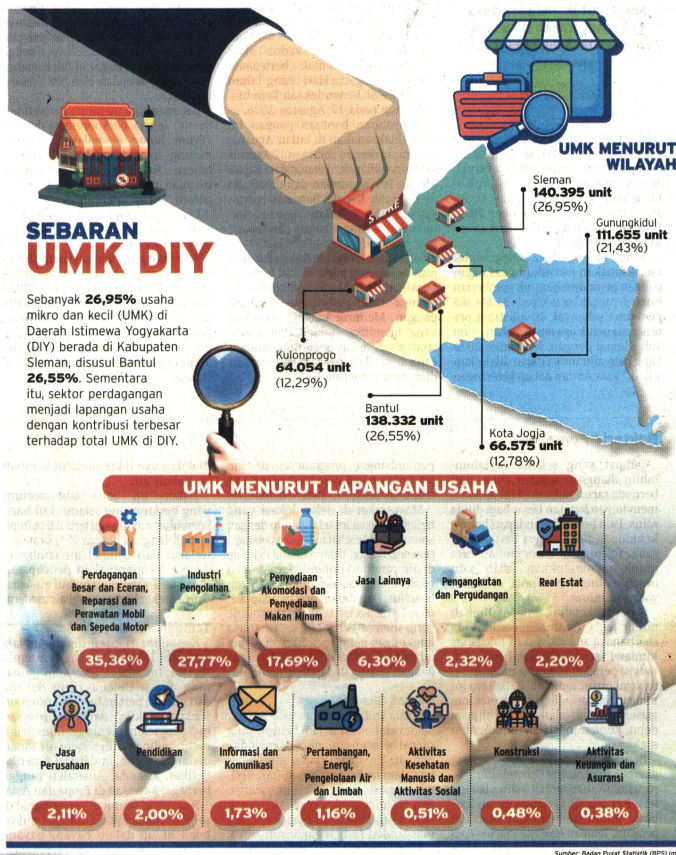




UMK Jadi Pilar di DIY, Perlu Penguatan Usaha



JOGJA—Sebanyak 98,36% unit usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan usaha mikro dan kecil (UMK). Pembiayaan dan pendampingan bagi UMK dinilai perlu diperkuat agar produktivitasnya meningkat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Anisatul Umah
anisatul@harianjogja.com

Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAIJY). Y. Sri Susilo, mengatakan UMK yang mencakup sekitar 98% dari total usaha di DIY memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, usaha berskala besar lebih banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dari aktivitas produksi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, distribusi usaha mikro dan kecil di DIY mencapai 98,36% dari total usaha, sedangkan secara nasional persentasenya mencapai 98,68%.

Menurut Sri Susilo, besarnya jumlah UMK di DIY menjadi alasan pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), perlu diarahkan kepada usaha yang produktif dan prospektif agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar.

"Prinsipnya secara umum, kredit secara umum termasuk KUR itu diberikan pada sektor yang produktif dan prospektif," ujarnya, Sabtu (1/8).

Kontribusi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, bergantung pada sektor usahanya. UMK di bidang kerajinan, kuliner, perdagangan, hingga usaha yang berkaitan dengan pariwisata memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi DIY.

Menurutnya, usaha yang prospektif tidak terbatas pada sektor yang

► Kontribusi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi, bergantung pada sektor usahanya.

► Usaha yang prospektif tidak terbatas pada sektor yang berhubungan langsung dengan pariwisata.

berhubungan langsung dengan pariwisata. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga berpeluang memperoleh manfaat karena menjadi bagian dari rantai pasok sektor pariwisata.

"UMK sektor pertanian itu kan tidak langsung. Tapi bahwa kemudian hasil-hasil pertanian, sayur-mayur, padi, dan sebagainya itu kan disetorkan kepada rumah makan dan sebagainya, yang rumah makan tadi melayani pariwisata," jelasnya.

Selain akses pembiayaan, Sri Susilo menilai pelaku UMK membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Menurut dia, perguruan tinggi dapat mengambil peran lebih besar dalam mendampingi pelaku usaha, termasuk hingga proses pengajuan kredit berhasil memperoleh persetujuan. "Jadi kalau mendampingi pengajuan kredit ya sampai goal kredinya. Tidak hanya pelatihan sekali jadi terus sudah cukup."

Sebaran Usaha

Data BPS menunjukkan sebaran usaha mikro dan kecil (UMK) di DIY terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Sleman memiliki 140.395 unit UMK atau 26,95% dari total UMK di DIY, tertinggi di antara lima kabupaten/kota (lihat grafik).

Kabupaten Bantul berada di posisi kedua dengan 138.332 unit atau 26,55%, disusul Gunungkidul sebanyak 111.655 unit (21,43%). Adapun Kota Jogja memiliki 66.575 unit (12,78%) dan Kulonprogo 64.054 unit (12,29%).

UMK Jadi...

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Sisi Barat, Ahmad Zaenal Bintoro, mengaku tidak mengalami kendala dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, fasilitas tersebut selama ini dimanfaatkan untuk menambah modal usaha. "Untuk pengajuan KUR mudah dan tidak ada kendala," ucapnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DIY, Juli Kestijanti, mengatakan penyaluran KUR hingga Juni 2026 mencapai Rp2,74 triliun kepada 48.290 debitur. Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp36,83 miliar yang disalurkan kepada 6.801 debitur. "Dukungan tersebut [APBN] hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran KUR dan UMi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Eko Yudianto, menyampaikan aset perbankan di DIY pada Januari 2026 mencapai Rp115,604 triliun atau tumbuh 3,86% secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp96,854 triliun atau meningkat 4,38% secara tahunan.

Kredit atau pembiayaan perbankan di DIY pada Januari 2026 tercatat Rp65,507 triliun atau tumbuh 3,59% secara tahunan. Penyaluran kredit didominasi sektor rumah

tangga sebesar Rp16,8 triliun, sektor perdagangan besar dan eceran Rp13,01 triliun, serta sektor konstruksi Rp9,7 triliun.

"Pada Januari 2026, kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM mencapai Rp27,538 triliun dengan *market share* mencapai 42 persen dari total kredit/pembiayaan perbankan."

Sedangkan hasil Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan (Pendataan UMK dan UMB) BPS menunjukkan usaha mikro dan kecil masih mendominasi struktur usaha nasional. Jumlah UMK mencapai 26.073.689 unit atau sekitar 98,68% dari total usaha/perusahaan di Indonesia.

Sebaliknya, jumlah usaha menengah dan besar (UMB) tercatat 348.567 unit atau sekitar 1,32% dari total usaha. Secara keseluruhan terdapat 26.422.256 unit usaha/perusahaan di Indonesia.

Dominasi UMK juga terlihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. BPS mencatat UMK mempekerjakan 59.266.885 orang, sedangkan UMB menyerap 19.406.401 orang. Total tenaga kerja yang tercatat mencapai 78.673.286 orang.

Sebaran usaha di Indonesia juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tiga provinsi dengan jumlah usaha terbanyak ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang secara bersama-sama menyumbang sekitar 50% dari total usaha di Indonesia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005